

# HUMAS UNIVERSITAS INDONESIA KLIPING

**KLASIFIKASI** : Universitas Indonesia - Iklan  
**TEMA** : Seminar “Keuangan Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah”  
**SURAT KABAR/MAJALAH** : Kompas

Hari Selasa Tanggal 19 Bulan Agustus Tahun 2008 Halaman 8 Kolom 5

## RINGKASAN:

ILUNI FE UI mengadakan seminar berjudul “Keuangan Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah”. Menghadirkan Ibu Dr. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Indonesia, sebagai Keynote Speaker. Seminar ini diadakan pada hari Senin, 25 Agustus 2008, pukul 08.30 – 17.00, di Golden Ballroom The Sultan Hotel, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.

## CATATAN:



**SEMINAR**  
KEUANGAN DAERAH DAN TATA KELOLA  
PEMERINTAHAN DAERAH

**Senin, 25 Agustus 2008** | **Golden Ballroom The Sultan Hotel**  
**Pukul 08.30 - 17.00** | **Jl. Gatot Subroto, Jakarta**

**Keynote Speaker : Ibu Dr. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI**

**SESI I : “REFORMASI KEUANGAN DAERAH”**

**Pembicara :**

- **Prof. Dr. Mardiasmo, MBA,**  
*Dirjen Perimbangan Keuangan, Dep. Keuangan RI*
- **Budi Sitapu, MA,**  
*Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dep. Keuangan RI*
- **Dr. Bambang Pamungkas, MBA,**  
*Direktur Pertanggungjawaban dan Pengawasan, Dep. Dalam Negeri RI*
- **Prof. Dr. Bambang P. S. Brodjonegoro, Ph.D,**  
*Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*

**Moderator :**  
**Prof. Dr. Robert A. Simanjuntak, Ketua Dep. Ilmu Ekonomi FEUI**

**SESI II : “BERBAGI PENGALAMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH”**

**Pembicara :**

- **Dr. Haryono Umar, Ak., M.Sc.,**  
*Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*
- **H. Imdad Hamid, SE,**  
*Walikota Balikpapan*
- **Drs. H. Djarot Syaiful Hidayat, MS,**  
*Walikota Blitar*
- **H. Untung Wiyono, SH,**  
*Bupati Sragen*
- **H. Gamawan Fauzi, SH, MM,**  
*Gubernur Sumatera Barat*

**Moderator :**  
**Dr. Suhasil Nazara, Ph.D, Kepala Lembaga Demografi, FEUI**

Investasi :  
Rp. 1.000.000.-  
per orang

Contact Persons : Hadi / Yanti . Tlp. (021) 759 13940. 706 28601, 707 28702 Fax. (021) 759 13940 Email : byond.comm@gmail.com

*Susunan acara*  
**SEMINAR KEUANGAN DAERAH  
 DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH**  
**(Pelaksana ILUNI FE dan MPKP FEUI)**  
 Senin, 25 Agustus 2008 – The Sultan, Jakarta

WAKTU	ACARA	PEMATERI
08.00 - 09.00	Pendaftaran Peserta & Coffee Break	
09.00	PEMBUKAAN	MC
09.05 - 09.15	Sambutan Ketua Umum ILUNI FEUI	Dr. Muliaman D. Hadad
09.15	<b>SESI I REFORMASI KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Moderator :</b> Prof. Dr. Robert A. Simandjuntak (Ketua Dep. Ilmu Ekonomi FEUI)
09.15 - 09.40	Kebijakan Dana Perimbangan Tahun 2009	Prof. Dr. Mardiasmo MBA (Dirjen Perimbangan Keuangan, Dep Keuangan RI)
09.40 - 10.05	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Drs. Budi Sitepu, MA (Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dep. Keuangan RI)

WAKTU	ACARA	PEMATERI
10.05 - 10.20	<b>Pembukaan &amp; Keynote Speech Menteri Keuangan Republik Indonesia</b>	Dr. Sri Mulyani Indrawati
10.20	<b>Seminar Sesi I kembali dilanjutkan</b>	MC
10.20 - 10.45	Proses Penganggaran dan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Dr. Bambang Pamungkas, MBA (Direktur Pertanggungjawaban dan Pengawasan, Dep. Dalam Negeri)
10.45 - 11.10	Kajian Kebijakan tentang Desentralisasi Fiskal	Prof. Bambang PS. Brodjonegoro, Ph.D (Dekan FEUI)
11.10 - 11.35	Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Local Governance)	Dr. Haryono Umar, Ak, M.Sc (Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi - KPK)
11.35 - 12.40	TANYA JAWAB SESI I	Moderator
12.40 - 13.40	ISHOMA	

WAKTU	ACARA	PEMATERI
13.40	<b>SESI II BERBAGI PENGALAMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Moderator Dr. Suahasil Nazara
13.40 - 14.05	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dalam Kaitannya dengan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dr. Yunus Husein (Kepala Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan/ PPA TK)
14.05 - 14.30	Penganggaran Berbasis Manajemen Kependudukan di Kota Balikpapan	H. Imdaad Hamid, SE (Walikota Balikpapan)
14.30 - 14.55	Sistem Pelayanan Terpadu dan Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Sragen	H. Untung Wiyono, SH (Bupati Sragen) Diwakili oleh : M. Isnadi SE. MM (Kepala Badan Pelayanan Terpadu /BPT Sragen)
14.55 - 15.40	Coffee Break II	

WAKTU	ACARA	PEMATERI
15.40 - 16.05	Akuntabilitas Keuangan Daerah di Kotamadya Blitar	Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, MS (Walikota Blitar)
16.05 - 16.30	Pengelolaan Keuangan Daerah dan Usaha Pemberantasan Korupsi (Dalam Pelaksanaan Pembangunan) di Provinsi Sumatera Barat	DR. Bambang Istijono, ME (Propinsi Sumatera Barat)
16.30 - 17.15	TANYA JAWAB SESI II	Moderator
17.15	<b>PENUTUP</b>	

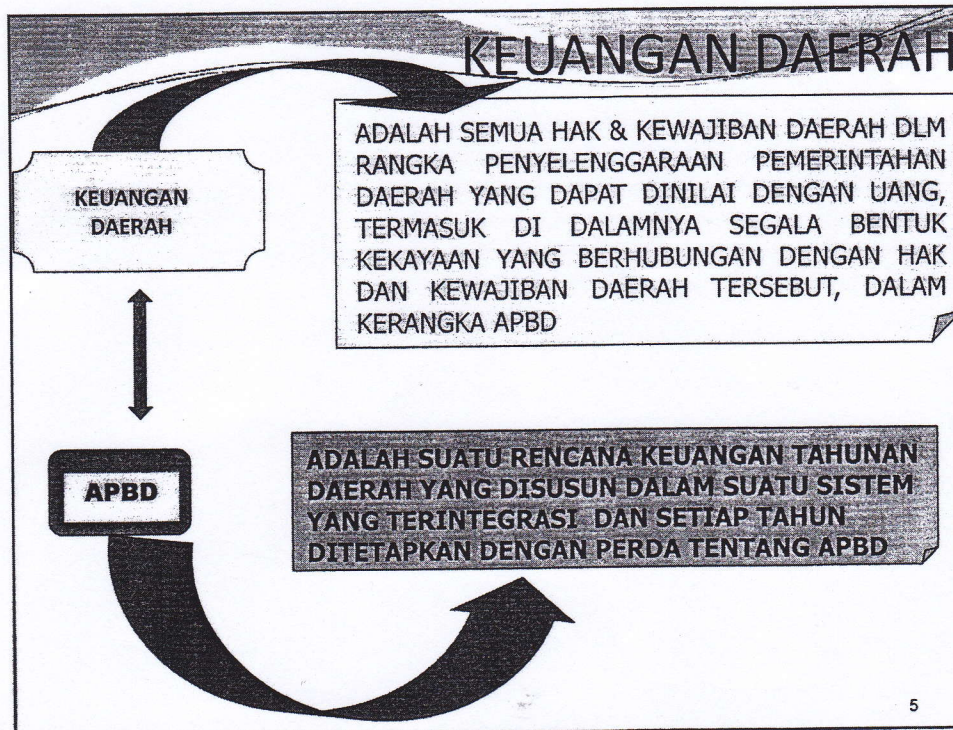


PAPARAN

**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN  
USAHA PEMBERANTASAN KORUPSI  
(DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN)  
DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

OLEH  
DR. BAMBANG ISTIJONO, ME

JAKARTA, 25 AGUSTUS 2008





# PERMASALAHAN KEUANGAN DAERAH

KEMAMPUAN  
KEUANGAN  
DAERAH



PENERIMAAN  
UMUM  
APBD



BELANJA  
PEGAWAI  
DAERAH



PAD



DAU



DBH



DAK



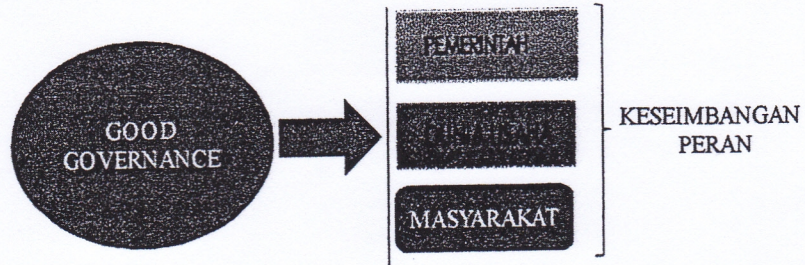
URUSAN WAJIB



URUSAN PILIHAN

GAJI PNS  
DAERAH

PENYELENGGARAAN KEPERINTAHAN YANG BAIK ADALAH KESEIMBANGAN PERAN KETIGA PILAR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (PEMERINTAH, DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT)





**FUNGSI  
PEMERINTAH**

**PENGATURAN**

- HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH
- HAK DAN KEWAJIBAN DUNIA USAHA
- HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

**PELAYANAN**

PELAYANAN DASAR

- KESEHATAN
- PENDIDIKAN
- PERUMAHAN  
DAN PEMUKIMAN

PELAYANAN UMUM

- SARANA DAN PRASARANA :
1. EKONOMI
  2. SOSIAL
  3. ADM MASY

PELAYANAN KHUSUS

- BENCANA
- KEMISKINAN
- PEKAT

**PEMBERDAYAAN**

- MENUMBUHKAN SEMANGAT DAN KRATIFITAS  
UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS
- MEMBERIKAN PELUANG DAN KESEMPATAN
- MENINGKATKAN KEMAMPUAN

# FUNGSI PEMERINTAH

## A. FUNGSI PENGATURAN

1. MENGATUR HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH
2. MENGATUR HAK DAN KEWAJIBAN DUNIA USAHA
3. MENGATUR HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

## B. FUNGSI PELAYANAN

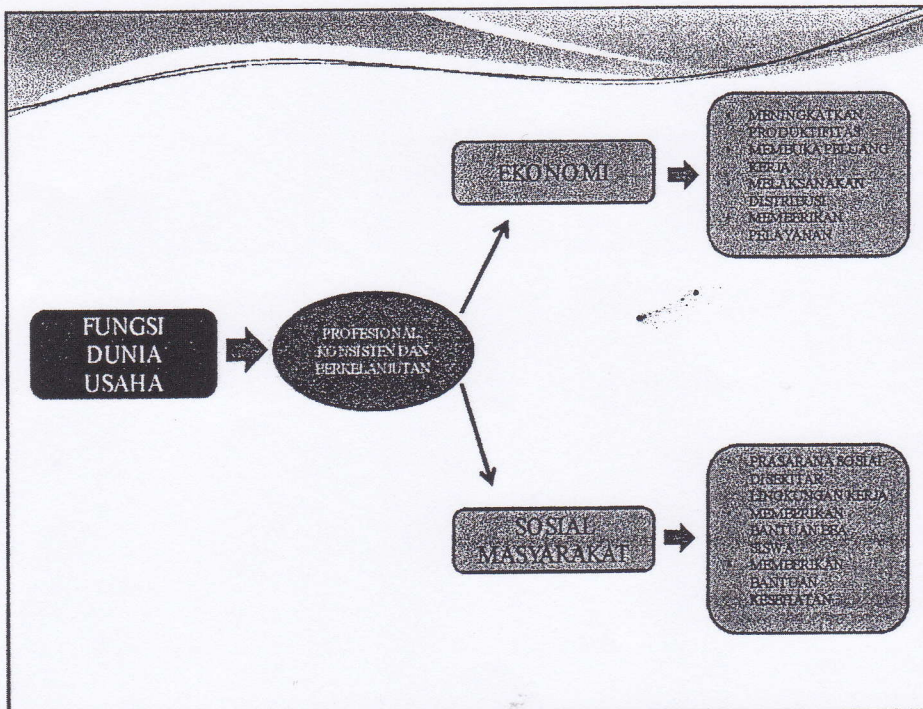
1. MELAKSANAKAN PELAYANAN DASAR
  - PELAYANAN KESEHATAN
  - PELAYANAN PENDIDIKAN
  - PELAYANAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
2. MELAKSANAKAN PELAYANAN UMUM
  - MEMBANGUN PRASARAN DAN SARAN EKONOMI, SEPERTI JALAN, JEMBATAN, PENGALIRAN, PASAR, AIR BERSIH
  - MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA SOSIAL, SEPERTI TAMAN KOTA, REST AREA, PANTI, RUMAH IBADAH
  - MELAKSANAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI MASYARAKAT, SEPERTI KTP, SURAT PINDAH, AKTE KELAHIRAN, PASPOR, DLL
3. MELAKSANAKAN PELAYANAN KHUSUS
  - PENANGANAN BENCANA
  - PENGENTASAN KEMISKINAN
  - PENANGANAN PENYAKIT MASYARAKAT



## FUNGSI PEMERINTAH

### C. FUNGSI PEMBERDAYAAN

1. MENUMBUHKAN SEMANGAT DAN KREATIFITAS UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS
2. MEMBERIKAN PELUANG DAN KESEMPATAN UNTUK BERBUAT
3. MENINGKATKAN KEMAMPUAN





## FUNGSI DUNIA USAHA

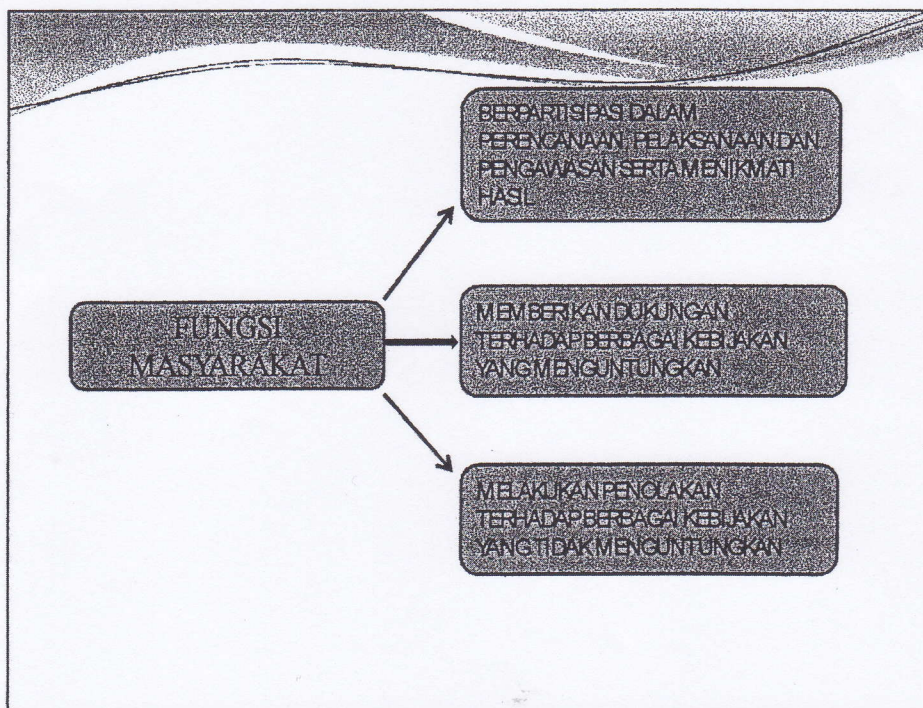
### A. MELAKSANAKAN AKTIFITAS SECARA PROFESIONAL, KONSISTEN DAN BERKELANJUTAN

#### 1. BIDANG EKONOMI

- MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS
- MEMBUKA PELUANG KERJA
- MELAKSANAKAN DISTRIBUSI
- MEMBERIKAN PELAYANAN

#### 2. BIDANG SOSIAL DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

- BANTUAN PENGEMBANGAN PRASARANA SOSIAL DI SEKITAR LINGKUNGAN KERJA
- MEMBERIKAN BANTUAN BEA SISWA
- MEMBERIKAN BANTUAN KESEHATAN





## FUNGSI MASYARAKAT

1. BERPARISIPASI DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN MENIKMATI HASIL
2. MEMBERIKAN DUKUNGAN TERHADAP BERBAGAI KEBIJAKAN YANG MENGUNTUNGKAN
3. MELAKUKAN PENOLAKAN TERHADAP BERBAGAI KEBIJAKAN YANG TIDAK MENGUNTUNGKAN

## PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Keuangan daerah perlu dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Disamping itu juga perlu memperhatikan best practices untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah



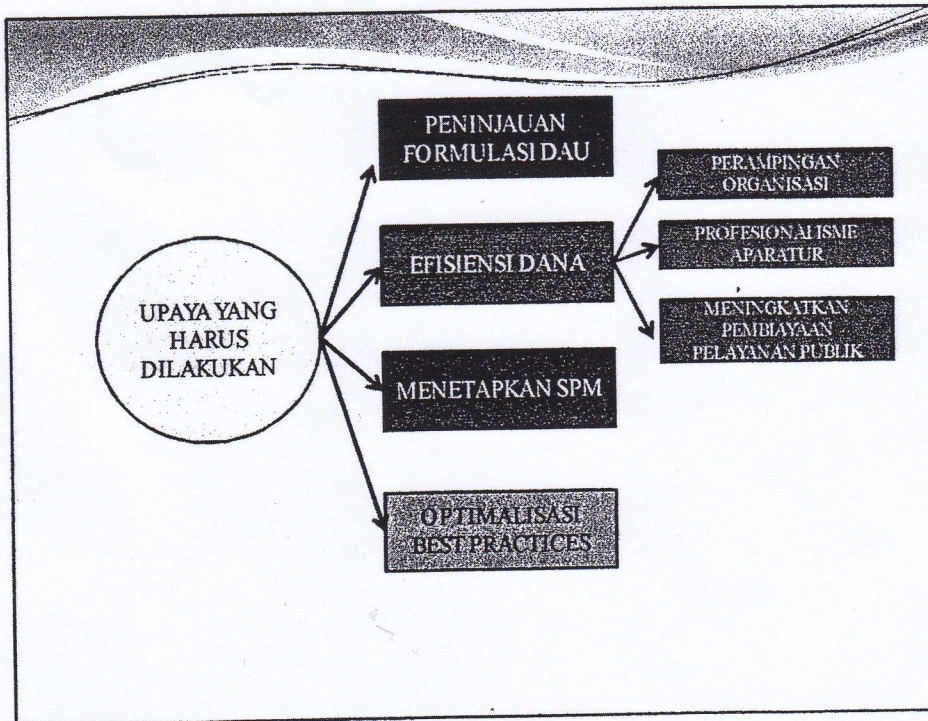
### PRINSIP-PRINSIP KEPEREMINTAHAN YANG BAIK

1. VISIONER
2. KETERBUKAAN DAN TRANSPARANSI
3. PARTISIPASI MASYARAKAT
4. AKUNTABILITAS
5. SUPERMASI HUKUM
6. DEMOKRASI
7. PROFESIONALISME DAN KOMPETENS
8. RESPONSIF
9. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS
10. DESENTRALISASI
11. KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT
12. KOMITMEN PADA PENGURANGAN KESENJANGAN
13. KOMITMEN PADA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP
14. KOMITMEN PADA PASAR YANG FAIR

### PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. KETERBUKAAN DAN TRANSPARANSI
2. PARTISIPASI MASYARAKAT
3. AKUNTABILITAS
4. SUPERMASI HUKUM
5. PROFESIONALISME DAN KOMPETENS
6. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS
7. DESENTRALISASI





### UPAYA YANG HARUS DILAKUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. PENINJAUAN KEMBALI FORMULA DAU  
(DAERAH-DAERAH YANG DIJADIKAN SEBAGAI HUTAN LINDUNG SUMBER AIR HARUS DIBERIKAN KOMPENSASI YANG SEIMBANG DENGAN DAERAH PENGHASIL)
2. MENINGKATKAN EFISIENSI PENGGUNAAN DANA DENGAN CARA
  - A. MERAMPINGKAN ORGANISASI
  - B. MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARATUR
  - C. MENINGKATKAN PEMBIAYAAN UNTUK PELAYANAN PUBLIK (MENGURANGI PEMBIAYAAN UNTUK APARATUR DAN POLITIK)
3. MENETAPKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
4. MENGOPTIMALKAN PELAKSANAAN BEST PRACTICES (KEUNGGULAN-KEUNGGULAN DAERAH)



# SERTIFIKAT



MENYAMPAIKAN PENGHARGAAN ATAS PARTISIPASI

*Dr. Bambang Sujono. MEd*  
Sebagai

**Narasumber**

Pada

**S E M I N A R**  
**KEUANGAN DAERAH DAN TATA KELOLA**  
**PEMERINTAHAN DAERAH**

SENIN, 25 AGUSTUS 2008 | GOLDEN BALLROOM THE SULTAN HOTEL

**Dr. Muliawan D. Hadad**  
Ketua Umum ILUNI FEUI

**Rullyati A. Wibowo, SE**  
Ketua Panitia